



Antikorupsi Harus Jadi Budaya

TAJUK

Gubernur DIY Sri Sultan HB X memperingatkan pejabat bupati, wali kota dan aparat sipil negara (ASN) di DIY agar tidak korupsi. Hal itu disampaikan Sultan sesuai menggelar rapat kerja bersama pimpinan KPK di Kompleks Kepatihan, Kamis (30/6).

Sultan menilai sebenarnya sangat mudah untuk menerapkan kebiasaan agar tidak melakukan tindakan korupsi. Kuncinya semua pejabat atau ASN harus mematuhi kesepakatan yang sudah ditandatangani melalui pakta integritas.

Di dalam perjanjian itu ada sumpah agar tidak melakukan korupsi atau menyalahgunakan kewenangan.

Sultan meminta kepada seluruh pejabat di DIY agar jangan mengkhianati perjanjian yang sudah ditandatangani untuk tidak korupsi. Jika dilanggar tentu ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung. Ia menegaskan tidak bisa membantu ASN jika sudah terjerat hukum.

Mencuatnya fakta korupsi kepala daerah memang bukanlah hal baru. Berdasarkan data di

situs kpk.go.id, sejak 2004 hingga Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota telah ditindak oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. Tak hanya itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang 2010-Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum. Khusus di DIY, KPK beberapa waktu lalu menangkap mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti

dan pejabat Pemkot Jogja serta ASN.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan, Sri Sultan HB IX telah mengingatkan Takhta untuk Rakyat. Menurutnya, slogan itu seharusnya diresapi dan dimaknai oleh seluruh pemimpin di DIY saat ini dalam bekerja melayani rakyat. Slogan yang pada akhirnya turut dijadikan pegangan untuk tidak tergiur pada tindakan korupsi karena akan menghambat pembangunan. Tidak hanya itu, para pemimpin juga bisa menjalankan semangat

yang telah dipancarkan oleh Tugu Golong Gilig. Tugu yang memiliki filosofi bahwa masyarakat DIY *manunggaling kawula lan Gusti*. Semangat persatuan rakyat dan penguasa untuk melawan penjajahan, sesuatu yang utuh, dan menyiratkan semangat dan niat menyatukan semua golongan.

Kami sependapat dengan *warning* yang disampaikan Sultan maupun Nurul Ghufron. Hanya, antikorupsi tidak bisa hanya jadi imbauan, Pemda DIY harus membudayakan pemerintahan yang

bersih yang akan menular sampai kabupaten kota. Perilaku antikorupsi harus dibudayakan, diawali dengan kampanye masif, membuka ruang pelaporan yang transparan dan mendorong masyarakat ikut *nyengkuyung* terbentuknya budaya antikorupsi, bukan malah nyengkuyung koruptor.

Semoga dengan terkuaknya kasus dugaan suap apartemen di Kota Jogja bisa menjadi momentum untuk mewujudkan pemerintahan di DIY menjadi bersih dari korupsi.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005